

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mengenai kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bogor dan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kesimpulan yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2017 setiap tahunnya mencapai target dan hasilnya melebihi angka yang telah ditentukan. Dari data tersebut pencapaian realisasi penerimaan PAD tertinggi pada tahun 2014 dan pencapaian realisasi penerimaan BPHTB tertinggi pada tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa BPHTB merupakan salah satu unsur dari Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar untuk PAD disetiap tahunnya.
2. Berdasarkan hasil analisis tingkat kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor tahun 2013-2017 mengalami penurunan dan peningkatan. Tahun 2015 mengalami tingkat kontribusi yang terendah dan yang tertinggi pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2013-2017 Kabupaten Bogor memiliki rata-rata tingkat kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang lebih sebesar 22,9% dan selama lima tahun tersebut Kabupaten Bogor termasuk dalam **kriteria sedang** untuk tingkat kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Dari data Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada tahun 2013-2017 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor tercatat meningkat setiap tahunnya dan ada pada kategori sedang. Hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor perlu meningkatkan hal-hal yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Sebagaimana yang telah diketahui data yang di dapatkan dari Bappenda Kabupaten Bogor bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan selama lima tahun tersebut dan salah satu kontribusi terbesar bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang merupakan salah satu item Pajak Daerah bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Walaupun dampaknya tidak terlihat secara langsung, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang juga menjadi sebab Indeks Pembangunan Manusia ikut meningkat.

## **B. Saran**

Adapun penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu:
  - a. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memahami hal yang berhubungan dengan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bogor dan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga, peneliti selanjutnya dapat

melakukan penelitian yang sama ataupun terkait dengan penelitian ini;

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaharui dan mengembangkan informasi yang terkait dengan penelitian, sebab mungkin dapat terjadi perubahan atau penambahan peraturan pemerintah daerah setempat yang berhubungan dengan bahasan penelitian ini.

2. Bagi instansi terkait, yaitu:

- a. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor diharapkan dapat mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja dengan terjun langsung ke lapangan guna melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara berkala terkait adanya kegiatan jual-beli atau yang berhubungan dengan tanah dan bangunan, untuk meminimalisir kegiatan yang menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan wajib pajak yang enggan membayar pajaknya. Agar penerimaan pendapatan dapat tercapai sesuai target atau lebih;
- b. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif berupa pengarahan dan penyuluhan terkait pentingnya pembayaran pajak untuk mendukung pemerintah dalam kegiatan pembangunan daerah setempat yang nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta pendekatan pada calon wajib pajak ataupun

potensi pajak daerah yang belum maju dalam perhitungan target daerah;

- c. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi lebih baik lagi dengan cara melakukan peningkatan pada pelayanan publik, perbaikan pada sarana dan prasarana untuk kegiatan masyarakat dan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut pemerintah memerlukan dana dan salah satu sumber dana pembiayaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya melalui peningkatan Pajak Daerah yang terus dioptimalkan.